



EVALUASI PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI DI KABUPATEN BELITUNG

EVALUATION OF INDUSTRIAL AREA DEVELOPMENT IN BELITUNG REGENCY

Bambang Winarno¹, Prihadi Nugroho²

¹Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung; winarno_bambang@yahoo.co.id

²Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro Semarang; prihadi_nugroho@yahoo.com

Info Artikel:

- Artikel Masuk: 16 Agustus 2018
- Artikel diterima: 19 September 2018
- Tersedia Online: 30 Maret 2020

ABSTRAK

Perkembangan pembangunan kawasan industri berperan besar mendorong pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional, investasi, teknologi baru, membuka lapangan pekerjaan, kompetisi pasar dan daya saing perusahaan. Permasalahan pengelolaan kawasan industri antara lain belum siapnya infrastruktur (pelabuhan, jalan, listrik, fasilitas), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah, regulasi, serta perbedaan persepsi antara perusahaan dengan aspek ekonomi. Demikian halnya dengan Kawasan Industri Suge (KIS) di Kabupaten Belitung meskipun telah di canangkan sejak lama (dari Tahun 2001) implementasinya hingga sekarang belum berkembang seperti yang di harapkan. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi pengembangan KIS berdasarkan persepsi pemerintah dan perusahaan. Penelitian ini penting dilakukan mengingat sejak ditetapkan KIS belum memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan daerah. Metode yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan pembobotan (scoring) dan skala Likert. Secara umum persepsi responden menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam menilai KIS, sedangkan hasil analisis menunjukkan bahwa KIS kurang potensial (tidak menarik) bagi investor karena minim fasilitas dan jauhnya jangkauan pasar domestik/regional. Selain itu determinasi lokasi dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran yang saat ini belum terpenuhi dalam Kawasan Industri Suge.

Kata Kunci : Evaluasi, Kawasan Industri, Persepsi

ABSTRACT

The development of industrial estate development plays a major role in driving national and regional economic growth, investment, new technology, opening jobs, market competition and competitiveness of companies. Problems with managing industrial estates include infrastructure (ports, roads, electricity, facilities), regional spatial plans (RTRW), regulations, and differences in perceptions between companies and economic aspects. Likewise with the Suge Industrial Area (KIS) in Belitung Regency even though it has been planned for a long time (from 2001) its implementation has not yet developed as expected. The purpose of this study is to evaluate the development of KIS based on the perceptions of the government and companies. This research is important because, since it was established, KIS has not made a significant contribution to regional growth. The method used is quantitative analysis with weighting (scoring) and Likert scale. In general, respondents' perceptions show that there is no significant difference in assessing KIS, whereas the results of the analysis show that KIS is less potential (unattractive) for investors due to lack of facilities and far reach of domestic / regional markets. In addition, the determination of location is influenced by demand and supply that are currently not fulfilled in the Suge Industrial Zone.

Keywords : Evaluation, Industrial Estate, Perception

Copyright © 2020 JPWK-UNDIP

This open access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY-NC-SA) 4.0 International license.

1. PENDAHULUAN

Kegiatan manusia sangat dipengaruhi oleh keberadaannya dalam beraktivitas dimana lokasi menjadi faktor utama, seperti tempat tinggal, bekerja dan interaksi antar lingkungan dan masyarakat. Sebagai contoh, lokasi tempat tinggal tidak sama dengan tempat untuk berkantor atau memproduksi barang, masing-masing memiliki lingkungan dan nuansa yang berlainan. Prinsip teori lokasi memfokuskan tentang aktivitas ekonomi berlangsung (Gorter and Nijkamp, 2015), kegiatan pada lokasi tertentu menyebabkan suatu lokasi akan dipilih oleh individu maupun perusahaan dalam menjalankan usahanya (Harrington and Warf, 1995) sehingga pemilihan lokasi yang tepat akan memberikan keuntungan bagi orang atau perusahaan yang bersangkutan.

Secara tradisional, lokasi fasilitas berpengaruh terhadap stabilitas sistem dan biaya transportasi (Zhang, M. Huang, J and Zhu, 2012) sedangkan klasifikasi yang digunakan dalam fasilitas, lokasi dan permasalahan (*Facility Location Problem*) sesuai dengan pendekatan statis, dinamis dan *stochastic* (Owen, S.H. and Daskin, 1998), demikian pula metode lokasi fasilitas dalam manajemen rantai pasokan (*Suplly Chain Management*) (Melo, M.T., Nickel, S and Saldanha-da-Gama, 2009) membahas hubungan umum antara lokasi fasilitas dan isu perencanaan sebagai rantai pasokan yang strategis. Lebih jauh Yang, J dan Lee, (1997), mengemukakan bahwa faktor utama yang dapat mempengaruhi keputusan lokasi untuk perusahaan mana pun adalah akses ke pasar / pusat distribusi, akses terhadap pasokan / sumber daya, kerjasama dengan industri lokal yang mapan, pertimbangan kompetitif, faktor lingkungan, tenaga kerja, pajak, infrastruktur transportasi dan biaya utilitas.

Lingkungan makro menentukan peluang pengembangan fungsi perusahaan, mengukur dampaknya terhadap lingkungan, mengurangi ketidakpastian operasi bisnis dan membuat penyesuaian strategis (Rymarzak & Siemińska, 2012). Berbagai isu dalam kegiatan bisnis adalah kebijakan pemerintah terkait kegiatan ekonomi dan sosial, menciptakan kondisi dan prinsip berfungsinya beragam bisnis (Mudambi, 2002). Sistem ekonomi, tingkat kebebasan dan peluang pasar sangat penting dalam tujuan bisnis, penilaian tingkat produktivitas, dan pemilihan lokasi mempengaruhi keputusan bagi perusahaan (Siemińska, 2002). Di sisi lain, faktor yang mempengaruhi daya tarik lokasi dari perspektif pasar terhadap produk, informasi, atau layanan mencakup jumlah konsumen, daya beli, dan transportasi antara konsumen dan lokasi. Transportasi ini melibatkan pengiriman barang ke pembeli atau sarana bagi pembeli untuk sampai ke titik penjualan atau layanan (Cushman and Wakefield, 2007). Sedangkan sisi penawaran ditentukan oleh kondisi lokasi yang memungkinkan usaha spesifik secara langsung atau tidak langsung, pengeluaran investasi pada tahap konstruksi serta tingkat profitabilitas perusahaan berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, fasilitas teknis, bahan baku dan energi (Azevedo-Pereira, J., Counto, G. and Nunes, 2010).

Perkembangan pembangunan kawasan industri berperan besar mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai negara (Baster, 1987) utamanya dalam penyediaan prasarana industri manufaktur. Meningkatnya daya beli/konsumsi di negara-negara Asia mempercepat munculnya kawasan industri baru yang kompetitif (Huo, 2014) dan berorientasi pasar ekspor. Secara langsung kawasan industri berpengaruh terhadap peningkatan investasi dalam dan luar negeri (Wang, 2013), mengakomodasi teknologi baru dan beradaptasi terhadap perubahan (Galloway & Newman, 2014) serta bersinergi dengan industri lokal dalam meningkatkan ekonomi regional (Hwa, 2016). Indonesia merupakan bagian dari konstelasi ekonomi global perlu meningkatkan daya saing dengan membangun kawasan industri yang terintegrasi, dimana program tersebut berperan strategis sebagai katalisator pertumbuhan dan membuka lapangan pekerjaan serta pemerataan pembangunan (Hartarto, 2016). Selain itu kawasan industri menciptakan kompetisi pasar yang menarik (Galloway & Newman, 2014), membangun kemitraan antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat (Panyathanakun. et al, 2013), dengan prinsip kolaboratif, memfasilitasi usaha bersama, pengembangan penelitian dan inovasi serta meningkatkan daya saing perusahaan (Sosnovskikh, 2017).

Sementara itu pembangunan industri nasional bertujuan memperluas lapangan pekerjaan, pemerataan kesempatan usaha dan meningkatkan ekspor (Jayadinata, 1999), karenanya tiap-tiap daerah berlomba membangun infrastruktur dalam mendukung industri yang berpotensi untuk dikembangkan. Namun demikian keputusan untuk mendirikan suatu perusahaan terpacu karena adanya permintaan produk cukup

besar dan kontinyu serta didukung daya beli yang memadai, sehingga cepat atau lambat akan menarik investor dalam menentukan skala produksi yang dijalankan oleh perusahaan yang bersangkutan di lokasi tertentu (Djojodipuro, 1992).

Permasalahan pengelolaan kawasan industri secara nasional antara lain belum adanya kesiapan infrastruktur (pelabuhan, jalan, listrik, fasilitas), belum siapnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah, regulasi industri dalam kawasan, serta perbedaan persepsi antara perusahaan dengan aspek ekonomi yang lebih dalam (Shahab, 2015). Demikian halnya dengan Kawasan Industri Suge (KIS) di Belitung yang di tetapkan sejak tahun 2001, dengan luas \pm 500 ha dengan lahan cadangan 1.414 ha dan pelabuhan regional serta PLTU 2x15 MW (Belitung, 2017) serta mendapat dukungan dari Kementerian Perindustrian melalui Surat Nomor : 403/BPPI/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009 tentang dukungan pengembangan kawasan industri di Kabupaten Belitung, namun realisasinya hingga sekarang belum berkembang seperti yang di harapkan. Selain itu belum sinerginya antara kebijakan pemerintah dan perusahaan, minimnya partisipasi masyarakat dan kurangnya inovasi dalam kelembagaan (Cao, 2011), rendahnya intervensi pemerintah pusat terhadap investasi asing, serta permasalahan status lahan dalam kawasan berdampak menurunkan minat investor (Xie, et. al, 2016) dalam membangun atau mengembangkan industri baru dalam kawasan.

Beberapa penelitian menemukan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kawasan industri bervariasi, seperti yang dilakukan oleh Munir (2015), pada Kawasan Industri Kendal, menunjukkan bahwa faktor yang menjadi penentu daya tarik investasi adalah variabel kelembagaan 28%, sosial politik 25.9%, infrastruktur 22.1%, tenaga kerja 15% dan ekonomi daerah 8.9%. Selanjutnya penelitian oleh Sutanta (2010), pada Kawasan Industri Nguter di Sukoharjo menemukan bahwa faktor-faktor penghambat dalam pengembangan KIN yaitu faktor aksesibilitas (lebar/kapasitas jalan arteri primer, stasiun kereta api dan bandara) yang tidak memenuhi standar, cadangan listrik industri dan kurangnya dukungan kebijakan pemerintah). Sedangkan Pratiknya (2007), mengemukakan bahwa perangkat peraturan belum mampu menarik minat investasi dalam menunjang perkembangan kawasan industri di Kota Semarang, sehingga diperlukan koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dalam menyusun peraturan terkait pengembangan kawasan industri.

Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi pengembangan Kawasan Industri Suge berdasarkan persepsi dari institusi pemerintah daerah dan perusahaan lokal yang ada di Kabupaten Belitung. Penelitian ini penting dilakukan karena tidak berkembangnya Kawasan Industri Suge di Kabupaten Belitung yang telah di tetapkan sejak lama. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada khasanah perkembangan ilmu pengetahuan tentang perencanaan wilayah dan kota, terkait implementasinya di lapangan dan juga sebagai pertimbangan atau masukan kepada pemerintah daerah terkait penyusunan/mengkaji ulang kebijakan program pengembangan kawasan industri, sehingga pemanfaatan lahan kawasan sesuai dengan potensi dan permasalahannya.

Unsur kebaruan dalam penelitian ini ditekankan pada evaluasi kawasan industri dengan menggali lebih dalam persepsi atau pandangan dari pemerintah daerah dan perusahaan setempat terkait Kawasan Industri Suge. Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif, yaitu dengan skala *Likert* dan skoring untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi terhadap pengembangan kawasan industri.

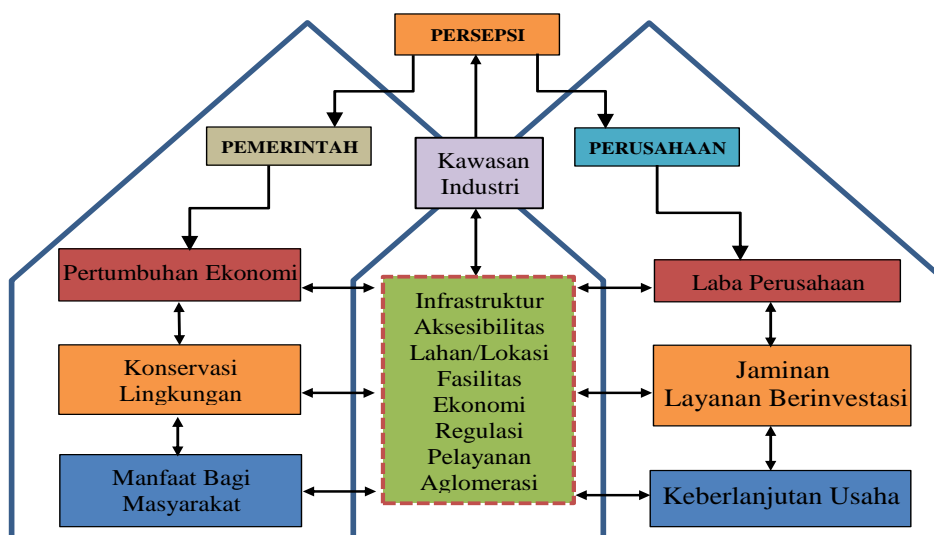
2. DATA DAN METODE

Konsep Penelitian dibangun berdasarkan adanya “gap” perbedaan antara persepsi pemerintah dan perusahaan dalam mengembangkan kawasan industri. Kondisi atau fakta dilapangan mengabaikan faktor-faktor penentu pengembangan kawasan industri sehingga tujuan dari masing-masing institusi tidak tercapai. Untuk menjembatani perbedaan persepsi tersebut maka diperlukan upaya mendalam dengan menyamakan persepsi dalam mengidentifikasi serta menganalisis faktor-faktor penentu pengembangan kawasan industri yang diperoleh dengan menggali informasi dari institusi pemerintah dan perusahaan. Gambar 1. berikut merupakan ilustrasi kerangka konsep penelitian pengembangan KIS.

2.1. Teknik Analisis

Analisis data dengan mengelompokan dan tabulasi data menurut responden dan variabelnya. Selanjutnya menghitung serta menguji hipotesis untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah yang di susun.

1. Identifikasi kondisi perkembangan KIS dilakukan dengan observasi atau pengamatan fisik lapangan (eksisting) secara langsung pada Kawasan Industri Suge maupun reviewdokumen terkait pada Dinas/SKPD Pemerintah setempat.
2. Identifikasi permasalahan pemilihan lokasi dalam pengembangan Kawasan Industri Suge dilakukan dengan menyebarkan angket atau kuesioner kepada pegawai di lingkungan pemerintah daerah dan perusahaan industri kategori menengah dan besar di Kabupaten Belitung.
3. Analisis persepsi pemerintah dan perusahaan terhadap pengembangan Kawasan Industri Suge, menggunakan kuisioner (angket) yang telah diisi oleh responden. Metode yang akan digunakan adalah skoring dan pembobotan dengan menggunakan 4 (empat) tingkat dengan skor tertinggi untuk setiap variabel yang diukur adalah 4 dan terendah adalah 1, dalam hal ini skor 4 untuk jawaban sangat setuju (SS), skor 3 untuk setuju (S), skor 2 untuk kurang setuju (KS) dan skor 1 untuk tidak setuju (TS).



Sumber: Hasil analisis, 2018

Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian

2.2. Gambaran Umum Wilayah

Kabupaten Belitung merupakan bagian dari provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2000 sebagai Provinsi yang ke-31. Secara geografis, Kabupaten Belitung terletak antara 107°08' BT sampai 107°58' BT dan 02°30' LS sampai 03°15' LS dengan luas daratan seluruhnya 229.369 ha. Gambar 2.2 berikut merupakan peta Kabupaten Belitung Dengan batas wilayah sebagai berikut: :

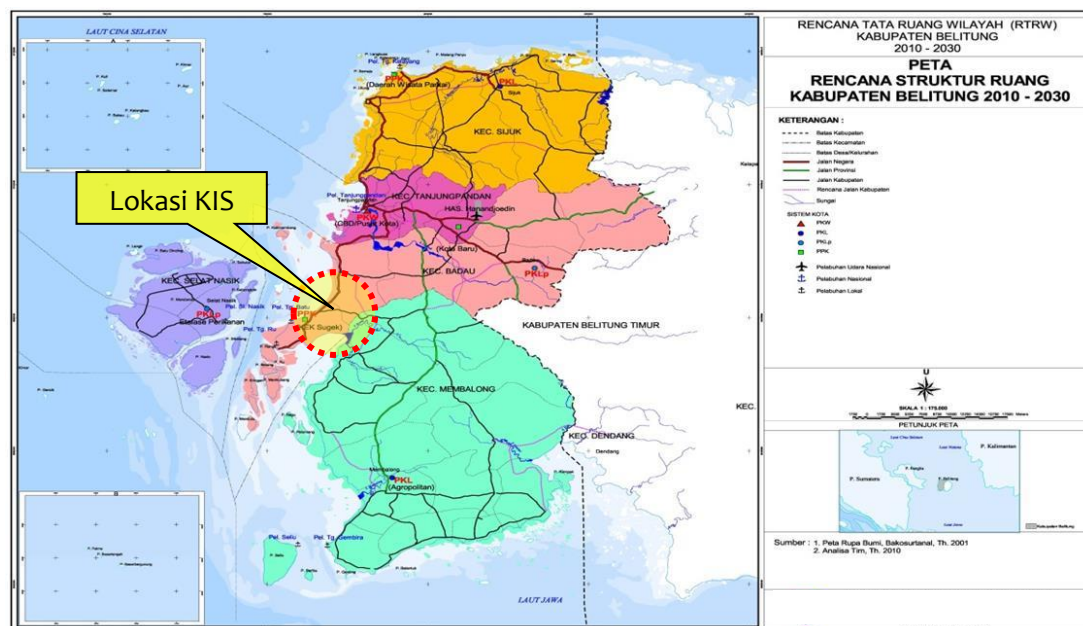
- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Belitung Timur,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan laut Jawa, dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Gaspar.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Identifikasi Kondisi Kawasan Industri Suge

Sejak dicanangkan Pemerintah Daerah pada Tahun 2001, KIS belum mengalami kemajuan yang signifikan, ini terlihat dengan lambatnya pembangunan prasarana fisik dan jumlah industri yang berinvestasi.

Pengelolaan KIS selama ini dilakukan oleh SKPD secara bersama-sama, seperti perencanaan melalui Bappeda, pembangunan fisik oleh Dinas PUPR dan perizinan oleh DPMPTSP dan dinas lain yang terkait. Melihat kondisi yang ada maka pengelolaan model tersebut tidak efektif karena keputusan terkait perencanaan dan pembangunan memerlukan jangka waktu yang lama dan anggaran pembangunan daerah yang terbatas. Sementara itu Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menyatakan bahwa kawasan industri merupakan kawasan permusatan kegiatan industri yang dilengkapi sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri. Hal tersebut belum dapat dipenuhi pemerintah setempat karena sampai saat ini KIS belum memiliki pengelola (perusahaan kawasan industri), sehingga penetapan KIS yang tidak diikuti dengan pembentukan pengelola belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



Sumber: Bappeda Kabupaten Belitung, 2018

Gambar 2. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Belitung

Tercatat ada tiga belas perusahaan industri yang beroperasi di KIS, sebanyak delapan perusahaan masih aktif sedangkan lima perusahaan yang lain menutup operasinya. Dari kelima perusahaan tersebut didominasi perusahaan pemurnian kaolin (PT. AKR, PT. APS, dan PT. BKM) dan pemurnian bijih timah (PT. STI dan PT. Justindo). Penutupan Smelter karena adanya moratorium tambang timah yang diterbitkan Gubernur sejak Januari 2016, sehingga berdampak pada berkurangnya suplai bahan baku. Sementara itu penghentian operasional industri pemurnian kaolin karena masa izin eksploitasi penambangan selama dua puluh tahun sejak 1995-2015 telah habis dan tidak diperpanjang, dengan alasan kurangnya cadangan kaolin dan terbatasnya luas areal pertambangan. Hal ini terjadi karena perubahan fungsi tata ruang kawasan dari fungsi pertambangan yang membatasi eksploitasi bahan galian mineral menjadi peruntukan industri dan permukiman.

Kurangnya kerjasama pemerintah dan swasta berdampak pada tidak berkembangnya KIS, ini terjadi karena prinsip-prinsip kolaboratif seperti saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan melalui pembinaan dan pengembangan usaha kurang mendapat perhatian. Hal ini terlihat pada DPMPTSP Kabupaten Belitung yang tidak memiliki mekanisme monitoring/evaluasi yang jelas termasuk data base perkembangan kondisi perusahaan di daerah. Selain itu hubungan kerjasama pemerintah dan swasta (industri kecil, menengah dan besar) ditinjau dari berbagai aspek (daya saing UKM, ukuran/kinerja perusahaan, riset pasar, pengembangan produk, SDM, teknologi baru, interaksi dan

komunikasi dengan pihak luar, pemasaran) perlu dimonitor dan dibangun secara sinergis dan berkelanjutan. Hal tersebut penting karena jika melihat potensi dan daya tarik investasi Kabupaten Belitung masih cukup menjanjikan bagi dunia usaha, ini terlihat dari data pada Tahun 2016 dan 2017 terdapat tujuh puluh perusahaan mengajukan ijin prinsip usaha industri di seluruh kecamatan dengan nilai investasi rencana lebih dari Rp 5,9 Trilyun, namun karena belum adanya mekanisme kerjasama pemerintah dan swasta yang baik, maka dikhawatirkan rencana tersebut tidak dapat direalisasikan sebagaimana mestinya. Untuk itu perlu sinergitas dan kerjasama pemerintah swasta untuk menghindari penyelewengan terhadap legalitas perusahaan setelah memperoleh izin.

Hingga saat ini Kabupaten Belitung belum memiliki Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten (RIPIK) sebagai acuan pengembangan kawasan industri daerah, hal ini mengindikasikan bahwa dukungan pemerintah terhadap sektor industri belum optimal. Melihat kondisi yang ada, maka KIS yang dicanangkan sebagai kawasan industri sejak Tahun 2001 dan ditetapkan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Belitung sulit berkembang karena ketidakpastian arahan pembangunan industri kabupaten. Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pengembangan Kawasan Industri Suge antara lain: menyusun studi kelayakan, masterplan kawasan industri, dan dokumen AMDAL. Namun demikian, implementasi dokumen yang ada kurang mendapat dukungan pemerintah daerah sebagaimana mestinya, hal ini terlihat dalam Renstra Dinas Perindustrian setempat Tahun 2013-2018 hanya memuat rencana aksi pembangunan fisik kawasan industri namun tidak diikuti dengan penetapan anggaran yang jelas.

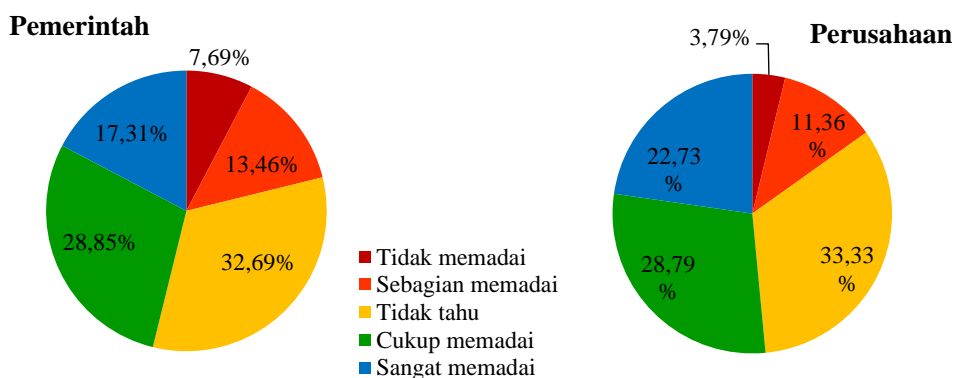
3.2. Identifikasi Pemilihan Lokasi Pengembangan KIS

Identifikasi pemilihan lokasi pengembangan Kawasan Industri Suge dilakukan dengan menyebarkan angket atau kuisioner kepada pegawai di lingkungan pemerintah daerah sebanyak 12 orang dan perusahaan industri menengah dan besar di Kabupaten Belitung sebanyak 33 perusahaan. Instrumen yang digunakan di peroleh melalui beberapa literatur dengan mengelompokkan ke dalam 8 variabel utama yaitu : infrastruktur, aksesibilitas, lokasi, fasilitas, ekonomi, regulasi, pelayanan dan aglomerasi.

Pengambilan data primer dilakukan antara awal Desember 2017 sampai dengan akhir Januari 2018. Berikut ini merupakan hasil rekapitulasi prosentase pendapat pemerintah dan perusahaan lokal terkait pemilihan lokasi dalam pengembangan Kawasan Industri Suge di Kabupaten Belitung untuk masing-masing variabel penelitian.

a. Persepsi Responden Terhadap Infrastruktur

Indikator yang digunakan dalam penilaian pada variabel infrastruktur yaitu jaringan jalan lingkungan, air bersih, air limbah dan energi listrik. Gambar berikut merupakan ilustrasi responden terhadap kondisi infrastruktur dalam KIS.



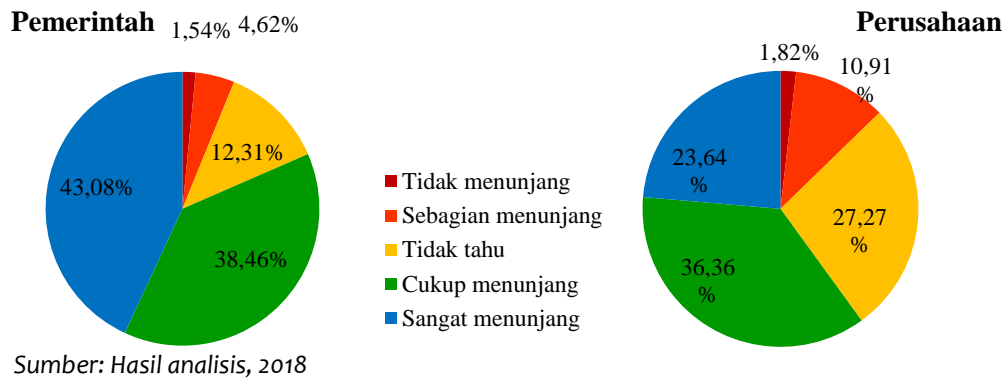
Sumber: Hasil analisis, 2018

Gambar 3. Persepsi Responden Terhadap Infrastruktur

Gambar 3 tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden tidak mengetahui kondisi infrastruktur (jalan, jaringan air bersih dan air limbah) dalam Kawasan Industri Suge, karena sebagian besar responden merupakan perusahaan diluar KIS. Sementara itu jawaban responden tertinggi pada indikator jaringan energi (listrik) menyatakan sangat memadai dan mendukung pengembangan kawasan. Dari uraian tersebut maka pembangunan infrastruktur fisik pada Kawasan Industri Suge belum sepenuhnya terrealisasi dengan baik sehingga belum menjadi perhatian responden.

b. Persepsi Responden Terhadap Aksesibilitas

Indikator yang digunakan dalam penilaian variabel aksesibilitas yaitu kondisi jalan utama, jaringan telekomunikasi, jarak ke bandara, jarak ke pelabuhan dan kondisi angkutan umum. Gambar berikut merupakan penilaian responden terhadap aksesibilitas KIS dalam mendukung sebagai kawasan industri.

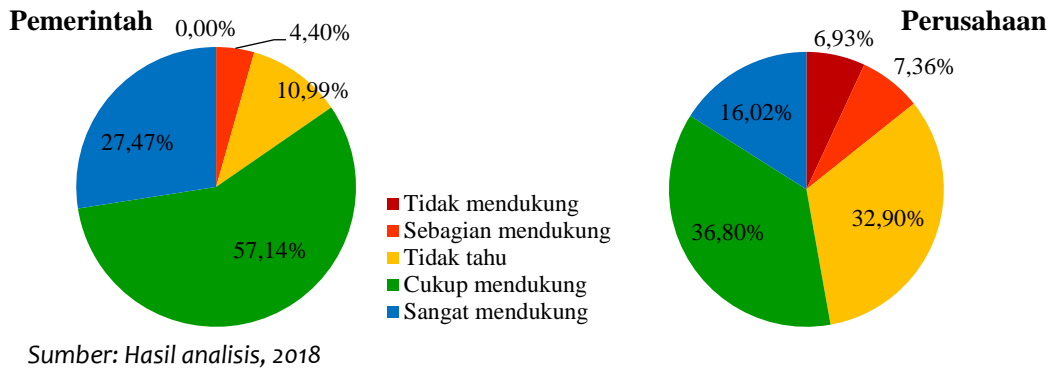


Gambar 4. Persepsi Responden Terhadap Aksesibilitas

Gambar 4 tersebut menunjukkan bahwa jawaban responden terkait aksesibilitas (jalan utama, jaringan telekomunikasi, jarak ke bandara, jarak ke pelabuhan dan kondisi angkutan umum) dalam KIS cukup dan sangat menunjang. Dari uraian tersebut dapat diartikan bahwa aksesibilitas KIS dari pelabuhan dan keberadaan jalan utama sangat mendukung dan potensial untuk dikembangkan, dengan kata lain bahwa kondisi aksesibilitas menuju KIS saat ini sangat mendukung sebagai kawasan industri.

c. Persepsi Responden Terhadap Lokasi

Indikator yang digunakan dalam penilaian variabel lokasi yaitu kondisi fisik lahan, ketersediaan lahan, jarak ke pusat kota, jarak ke permukiman, jarak sungai, peruntukan lahan dan luas lahan. Gambar berikut hasil penilaian responden terhadap lokasi KIS sebagai kawasan industri.

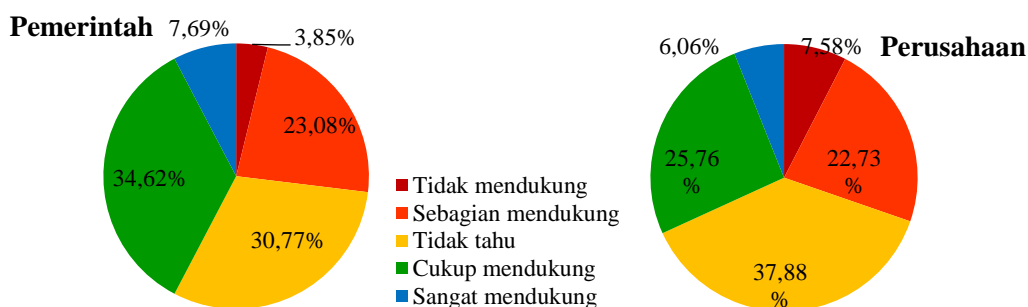


Gambar 5. Persepsi Responden Terhadap Lokasi

Gambar 5 tersebut menunjukkan jawaban responden sepakat bahwa lokasi KIS mendukung sebagai kawasan industri. Sehingga dapat diartikan bahwa lokasi Kawasan Industri Suge yang ditetapkan sangat mendukung dan potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan industri, sedangkan kondisi fisik lahan dan jarak ke sungai perlu mendapat perhatian karena keduanya memiliki pengaruh terkait biaya investasi awal pembangunannya.

d. Persepsi Responden Terhadap Fasilitas

Indikator yang digunakan adalah fasilitas kenyamanan (perkantoran) dan prasarana penunjang lainnya (penerangan jalan, tempat ibadah, pemadam kebakaran dan lain-lain). Gambar berikut merupakan jawaban responden terhadap fasilitas dalam KIS.



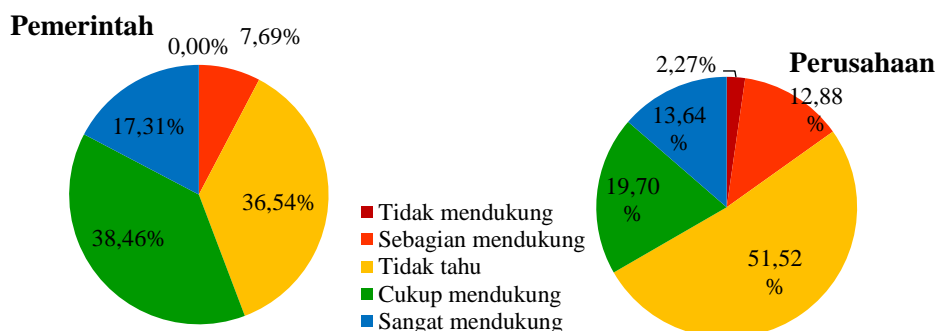
Sumber: Hasil analisis, 2018

Gambar 6. Persepsi Responden Terhadap Fasilitas

Gambar 6 tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden tidak mengetahui kondisi fasilitas KIS, hal ini cukup beralasan karena kondisinya belum terbangun, sehingga dapat diartikan bahwa kondisi fasilitas dalam KIS saat ini belum mendukung sebagai kawasan industri. Karena itu perlu perhatian bagi pemerintah dan para pihak terkait untuk membangun prasarana fisik (fasilitas) dalam KIS seperti perkantoran, penerangan jalan dan prasarana penunjang lainnya, sehingga keberadaan KIS bermanfaat bagi kepentingan (pemerintah) daerah, perusahaan dan masyarakat.

e. Persepsi Responden Terhadap Ekonomi

Indikator ekonomi yang digunakan dalam penilaian adalah harga lahan, peluang investasi, kerjasama pemerintah swasta dan perpajakan atau retribusi. Gambar berikut merupakan penilaian responden terhadap kondisi ekonomi dalam mendukung KIS.



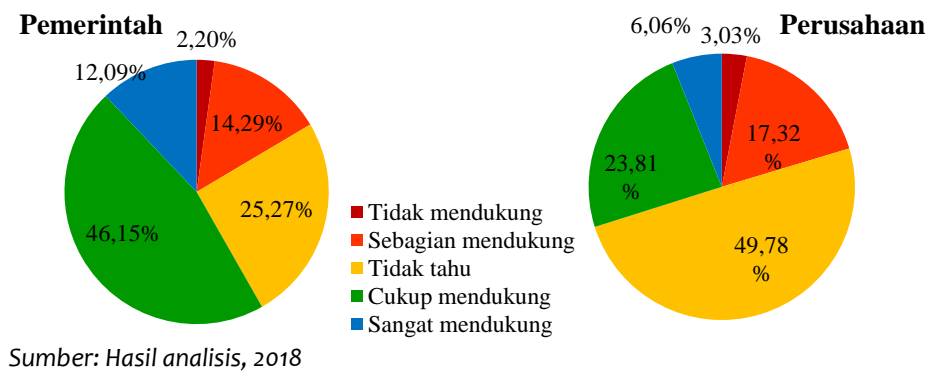
Sumber: Hasil analisis, 2018

Gambar 7. Persepsi Responden Terhadap Ekonomi

Gambar 7 tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan perspsi antara pemerintah dan perusahaan dalam menilai indikator ekonomi daerah dalam menunjang KIS, jika pemerintah berpendapat bahwa ekonomi daerah mendukung pengembangan KIS, sedangkan perusahaan tidak tahu kondisi ekonomi daerah. Hal ini diketahui dikarenakan adanya perbedaan latar belakang pendidikan dan pengetahuan responden dalam menilai kondisi ekonomi daerah, selain itu sifatnya yang dinamis dan berubah-ubah dalam jangka waktu tertentu menyulitkan responden dalam penilaian.

f. Persepsi Responden Terhadap Regulasi

Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi adalah sosialisasi, insentif, jaminan keamanan, iklim investasi, pengelola/manajemen, dukungan legislatif dan regulasi. Gambar berikut merupakan penilaian responden terhadap regulasi daerah dalam mendukung KIS sebagai kawasan industri.

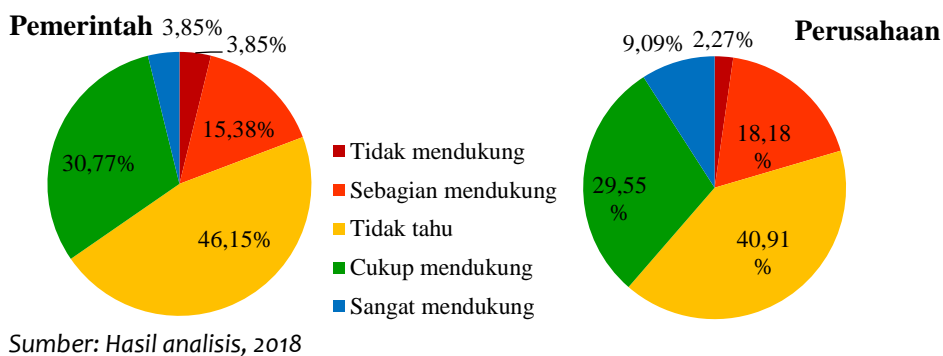


Gambar 8. Persepsi Responden Terhadap Regulasi

Gambar 8 tersebut menunjukkan bahwa persepsi responden dalam menilai regulasi yang berlaku dalam mendukung Kawasan Industri Suge cukup bervariasi. Dari uraian tersebut maka terdapat perbedaan persepsi antara pemerintah dan perusahaan, hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dan pemahaman peraturan terkait rencana pengembangan KIS tidak sampai kepada masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi dan implementasi regulasi kepada masyarakat dan dunia usaha terkait kebijakan pengembangan KIS, sehingga tujuan program dalam menarik minat investasi tercapai.

g. Persepsi Responden Terhadap Pelayanan

Indikator selanjutnya yang digunakan untuk mengevaluasi variabel pelayanan meliputi tata tertib, kemudahan perizinan, kelengkapan sarana/prasarana dan kewajiban pengusaha. Gambar berikut adalah penilaian responden terhadap pelayanan dalam KIS.

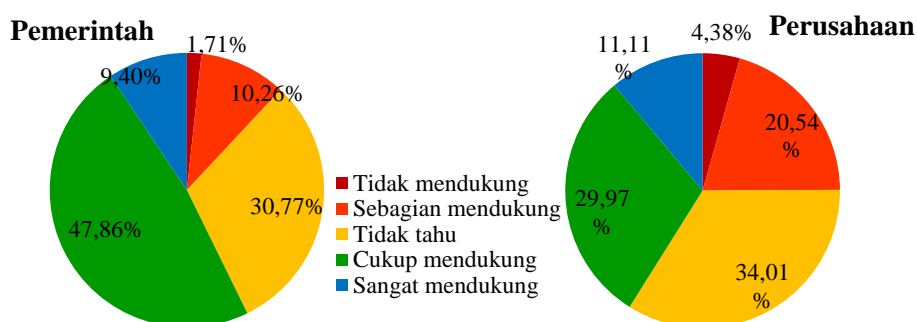


Gambar 9. Persepsi Responden Terhadap Pelayanan

Gambar 9 tersebut menunjukkan bahwa responden kurang mengetahui kondisi pelayanan dalam KIS, hal ini sangat beralasan karena pembangunan kawasan belum terrealisasi sebagaimana mestinya. Disisi lain terlihat jawaban responden pemerintah menunjukkan bahwa ada optimisme pemerintah terkait pelayanan dan perizinan yang masih dikelola dinas teknis terkait. Sedangkan responden perusahaan tidak tahu, sehingga dapat diartikan bahwa kondisi pelayanan yang ada saat ini belum mendukung perkembangan Kawasan Industri Suge, untuk itu perlu perhatian pemerintah (dinas terkait) untuk menyediakan pelayanan yang baik, transparan dan sesuai legalitas standar.

h. Persepsi Responden Terhadap Aglomerasi

Indikator aglomerasi yang digunakan adalah industri sejenis, kemitraan lokal, upah pekerja, skill pekerja, asal bahan baku, supplier, biaya angkutan, letak pasar dan biaya hidup. Gambar berikut merupakan jawaban responden terhadap aglomerasi yang terjadi dalam KIS.



Sumber: Hasil analisis, 2018

Gambar 10. Persepsi Responden Terhadap Aglomerasi

Gambar 10 tersebut menunjukkan bahwa jawaban responden dalam menilai aglomerasi dalam mendukung Kawasan Industri Suge cukup bervariasi. Dengan demikian terdapat perbedaan persepsi antara pemerintah dan perusahaan walaupun tidak signifikan, perbedaan persepsi pemerintah dan perusahaan dalam menilai pengembangan KIS cukup beralasan karena indikator dalam aglomerasi bersifat dinamis dan dalam jangka panjang sangat dipengaruhi oleh kondisi makro ekonomi secara nasional maupun lokal.

3.3. Analisis Persepsi Pemerintah dan Perusahaan

Tabel berikut merupakan hasil rekapitulasi frekuensi dan prosentase jawaban responden dalam menilai rencana pengembangan Kawasan Industri Suge.

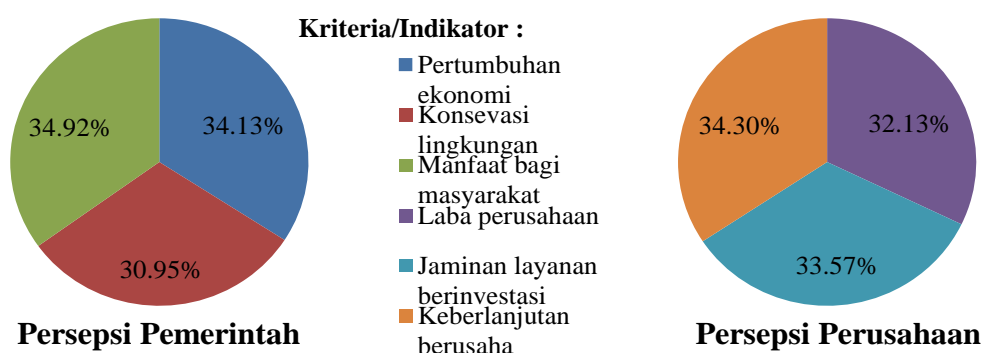
Tabel 1. Frekuensi dan Prosentase Persepsi Responden dalam Menilai KIS

No	Item Pernyataan	Tidak Setuju (1)		Kurang Setuju (2)		Setuju (3)		Sangat setuju (4)		Skor	Mean
		F	%	F	%	F	%	F	%		
A Responden Pemerintah											
1	Pertumbuhan ekonomi	0	0.00	1	0.08	7	0.54	5	0.38	43	3.31
2	Konsevasi lingkungan	0	0.00	2	0.15	9	0.69	2	0.15	39	3.00
3	Manfaat bagi masyarakat	0	0.00	0	0.00	8	0.62	5	0.38	44	3.38

No	Item Pernyataan	Tidak Setuju (1)		Kurang Setuju (2)		Setuju (3)		Sangat setuju (4)		Skor	Mean
		F	%	F	%	F	%	F	%		
B Responden Perusahaan											
1	Laba perusahaan	2	0.06	8	0.24	21	0.64	2	0.06	89	2.70
2	Jaminan layanan berinvestasi	2	0.06	6	0.18	21	0.64	4	0.12	93	2.82
3	Keberlanjutan berusaha	1	0.03	4	0.12	26	0.79	2	0.06	95	2.88

Sumber: Hasil analisis, 2018

Secara umum persepsi pemerintah dan perusahaan memiliki penilaian yang bervariasi dan rata-rata jawaban responden adalah diatas 2,70 (setuju dan sangat setuju). Hal ini dapat diartikan bahwa rencana pengembangan KIS memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi, konservasi lingkungan, bermanfaat bagi masyarakat, meningkatkan laba perusahaan, menjamin layanan berinvestasi dan keberlanjutan berusaha bagi perusahaan. Gambar berikut merupakan ilustrasi persepsi pemerintah dan perusahaan terhadap rencana pengembangan KIS di Kabupaten Belitung.



Sumber: Hasil analisis, 2018

Gambar 11. Persepsi Pemerintah dan Perusahaan

Dari gambar 11 di atas dapat diartikan bahwa penilaian pemerintah dan perusahaan terhadap kebijakan rencana pengembangan KIS di Kabupaten Belitung rata-rata memiliki persamaan persepsi dengan tanggapan positif terhadap rencana pengembangan KIS, walaupun secara implementasi di lapangan belum berdampak nyata. Mereka berpendapat bahwa jika KIS dikelola dengan baik akan bermanfaat bagi masyarakat, karena kebutuhan industri adalah para pekerja, akomodasi dan konsumsi yang dipenuhi oleh warga setempat, ini sejalan dengan pendapat Hartarto (2016), Galloway dan Newman (2014), Panyathanakun. et al, (2013), Sosnovskikh (2017). Selanjutnya pertumbuhan ekonomi akan ditimbulkan dari aktivitas industri berupa perdagangan dan jasa yang saling berinteraksi, hal tersebut sesuai dengan Baster (1987), Hwa Pan dan Xuan (2016). Kemudian rencana pengembangan KIS dapat mengurangi dampak pencemaran lingkungan akibat industrialisasi karena kegiatan industri mudah di kontrol dan diawasi apabila berada dalam satu lokasi hamparan atau kawasan. Sehingga konservasi alam dan perlindungan lingkungan akan terjaga. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Shin Hsu (2014) Panyathanakun, et. al (2013), Ntasiou dan Andreoua (2017), Galloway dan Peter (2014).

Sedangkan persepsi perusahaan berpandangan bahwa pengembangan KIS berpotensi nyata terhadap keberlanjutan berusaha karena efek jangka panjang hilirisasi industri yang terintegrasi dalam kawasan hal ini sejalan dengan pendapat Agboola (2015). Selain itu bahwa kawasan industri memberikan manfaat kemudahan layanan dan jaminan berinvestasi bagi para investor, sehingga perusahaan-perusahaan dalam kawasan industri leluasa menjalankan usahanya karena kejelasan regulasi hal tersebut sesuai dengan pendapat Conway (1980) dan Wang (2013). Rencana pengembangan KIS juga berpengaruh terhadap keuntungan atau laba perusahaan karena adanya kegiatan industri yang terintegrasi membutuhkan beragam bahan baku dan jasa perdagangan lainnya, dengan demikian terjadi efek yang beresonansi bagi keuntungan perusahaan utamanya penggunaan bahan baku dan proses distribusi barang, ini tersebut sependapat dengan Huo (2014).

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa KIS belum menunjukkan perkembangan, ini terjadi karena belum optimalnya pengelolaan KIS, adanya pembatasan terhadap mineral tambang sebagai bahan baku industri, belum optimalnya kerjasama pemerintah swasta dan kurangnya dukungan pemerintah dalam hal penganggaran utamanya dalam pengembangan Kawasan Industri Suge. Selain itu dalam penetapan KIS sebagaimana dalam RTRW telah sesuai ketentuan standar normatif yang ada, namun tidak menarik minat investor karena faktor status lahan, lokasi dan jarak KIS terhadap pusat distribusi nasional, regulasi yang belum memihak sektor industri, belum adanya manajemen atau perusahaan pengelola kawasan industri dan kondisi infrastruktur (fasilitas kawasan) yang belum lengkap.

Kesimpulan lain bahwa pemerintah daerah terkesan hanya memenuhi kewajiban sebagaimana Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang mengamanatkan bahwa kegiatan industri harus terpusat dalam satu kawasan, namun kurang memperhitungkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengembangan kawasan industri seperti infrastruktur, regulasi dan kelembagaan serta dukungan perusahaan setempat, sehingga KIS yang ditetapkan kurang menarik meskipun secara persepsi pemerintah dan perusahaan optimis bahwa KIS mampu memberikan kontribusi ekonomi dan kemajuan bagi pembangunan daerah.

Untuk melengkapi penelitian ini, maka penulis merekomendasikan beberapa penelitian lebih lanjut antara lain, studi potensi industri berbasis sumberdaya lokal dalam mendukung pengembangan KIS dan Kajian tentang optimalisasi Pelabuhan Regional Tanjung Batu dalam mendukung KIS.

5. PERNYATAAN RESMI

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Pemerintah Kabupaten Belitung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian ini. Semoga penelitian ini memberikan manfaat bagi para pihak yang berkepentingan.

6. REFERENSI

- Azevedo-Pereira, J., Counto, G. and Nunes, C. (2010). Optimal Timing of Relocation. *International Journal of Managerial Finance*, 6(2), 143–163.
- Agboola, A.O. (2015). "Neoclassical Economics And New Institutional Economics: an Assessment of Their Methodological Implication for Property Market Analysis." *Property Management*, Vol. 33 Issue: 5, pp.412-429.
- Baster, B. (1987). Prototype Development Parks. *Economic Development Review*, 5.
- Belitung. (2017). *Kabupaten Belitung Dalam Angka 2016*. Belitung, Indonesia.
- Cao, X. and C. Z. B. (2011). Institutional Perspective on Emerging Industry Development: Foreign Experiences and Policy Implication for China. *Journal of Science and Technology Policy in China*, 2(3), 255–276.
- Conway, M. (1980). *Marketing Industrial Buildings and Sites*, Conway Publications, Inc., Atlanta, GA.
- Cushman and Wakefield. (2007). *Europe Real Estate Strategy: landlord and Tenant Survey 2007*.
- Djojodipuro, M. (1992). *Teori Lokasi*. Jakarta: LPFE Universitas Indonesia.
- Galloway, D., & Newman, P. (2014). How to design a sustainable heavy industrial estate. *Renewable Energy*, 67, 46–52. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2013.11.018>

- Gorter, C and Nijkamp, P. (2015). Location Theory. *International Encyclopedia of the Social and Behavioral Science (Second Edition)*, 14, 287–292.
- Harrington, JW and Warf, B. (1995). *Industrial Location : Principles, Practice and Policy*, New York. Oxfordshire OX 14.
- Hartarto, A. (2016). *Seminar Nasional dan Musyawarah Nasional VII Himpunan Kawasan Industri*. Jakarta Indonesia.
- Huo, D. (2014). Impact of Country-level Factors on Export Competitiveness of Agriculture Industry from Emerging Markets. *Competitiveness Review*, 24(5), 393–413.
- Hwa, P. W. and X.-T. (2016). *Endogenous Growth Theory and Regional Performance: The Moderating Effects of Special Economic Zones*.
- Indonesia. Peraturan Menteri Perindustrian No 40/M-IND/PER/6/2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri (2016).
- Jayadinata, J. T. (1999). *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Perdesaan, Perkotaan dan Wilayah*. Bandung Indonesia: Institut Teknologi Bandung.
- Melo, M.T., Nickel, S and Saldanha-da-Gama, F. (2009). Facility Location and Supply Chain Management-a Review. *European Journal of Operational Research*, 196(2), 401–412.
- Mudambi, R. (2002). "The Location Decision of Multinational Enterprise" in McCann, P (Ed), *Industrial Location Economics*, Edward Elgar, Aldershot.
- Munir, M.M. 2015. "Strategi Pengembangan Kawasan Industri Kendal Dalam Upaya Meningkatkan Investasi Daerah." *Jurusan Ekonomi Pembagunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang*.
- Ntasioua, M. and Andreoua, E. (2017). "The Standard of Industrial Symbiosis." *Environmental Criteria and Methodology on the Establishment and Operation of Industrial and Business Parks*.
- Owen, S.H. and Daskin, M. S. (1998). Strategic Facility Location : a Review *European Journal of Operational Research*, 111(3), 423–447.
- Panyathanakun, V., Tantayanon, S., Tingsabhat, C., & Charmondusit, K. (2013). Development of eco-industrial estates in Thailand: initiatives in the northern region community-based eco-industrial estate. *Journal of Cleaner Production*, 51, 71–79. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.09.033>
- Pratiknya. 2007. "Pengembangan Kawasan Industri Dalam Meningkatkan Investasi Di Kota Semarang." Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Rymarzak, M., & Siemińska, E. (2012). Factors affecting the location of real estate. *Journal of Corporate Real Estate*, 14(4), 214–225. <https://doi.org/10.1108/JCRE-11-2012-0027>
- Shahab, F. (2015). Hambatan dan Tantangan Dalam Perencanaan Masterplan Kawasan Industri. In *Pertemuan Teknis Perumusan Kebijakan Pengembangan Industri Malalui Policy Advisory Unit*. Jakarta Indonesia: Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.
- Shin, H.M., Yung-Lung, and Feng L-Lin J., (2014), "The impact of industrial clusters on human resource and firms performance." *Journal of Modelling in Management*, Vol. 9 Iss 2 pp. 141 – 159.
- Sosnovskikh, S. (2017). Industrial clusters in Russia: The development of special economic zones and industrial parks. *Russian Journal of Economics*, 3(2), 174–199. <https://doi.org/10.1016/j.ruje.2017.06.004>.
- Sutanta, 2010. "Faktor-faktor Penyebab Tidak Berkembangnya Kawasan Industri Nguter Kabupaten Sukoharjo" Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah Dan Kota Universitas Diponegoro Semarang.
- Wang, J. (2013). The economic impact of Special Economic Zones: Evidence from Chinese municipalities. *Journal of Development Economics*, 101, 133–147. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2012.10.009>
- Xie, H., Wang, W., Yang, Z., & Choi, Y. (2016). Measuring the sustainable performance of industrial land utilization in major industrial zones of China. *Technological Forecasting and Social Change*, 112, 207–219. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.06.016>
- Yang, J and Lee, H. (1997). An AHP Decision Model for Facility Location. *Facilities*, 15(9), 241–254.
- Zhang, M. Huang, J and Zhu, J. (2012). Reliable Facility Location Problem Considering Facility Failure Scenarios. *Kybernetika*, 41(10), 1440–1461.